

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 yang mempunyai tema **“Memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat”** mempunyai 4 (empat) isu strategis, yaitu :

1. Peningkatan daya saing :
 - a. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha
 - b. Percepatan pembangunan infrastruktur
 - c. Peningkatan pembangunan industry di berbagai koridor ekonomi
 - d. Penciptaan kesempatan kerja, khususnya tenaga kerja muda
2. Peningkatan daya tahan ekonomi :
 - a. Peningkatan ketahanan pangan : menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton
 - b. Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energy.
3. Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat :
 - a. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia
 - b. Percepatan pengurangan kemiskinan : klaster 1 - 4
4. Pemantapan stabilitas sosial politik :
 - a. Perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan koperasi
 - b. Percepatan pembangunan minim essential Force

Strategi yang dilaksanakan pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha pada tahun 2016 diantaranya adalah :

- a. Penyerdehanaan prosedur investasi dan prosedur berusaha;
- b. Peningkatan efisiensi logistik nasional;
- c. Pengembangan kawasan ekonomi khusus;
- d. Harmonisasi kebijakan ketenagakerjaan.

Sasaran yang ingin dicapai pemerintah dalam peningkatan iklim investasi dan iklim usaha di tahun 2016 adalah :

- a. Meningkatnya investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 11, 1 %
- b. Meningkatnya tingkat kemudahan berusaha (ease of doing business) :

- Waktu untuk memulai usaha : 20 hari
- Perijinan mendirikan bangunan : 137 hari
- Perolehan listrik : 90 hari
- Pendaftaran property : 20 hari

Arah kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam iklim investasi dan iklim usaha pada tahun 2015, diantaranya adalah :

1. Penyederhanaan dan percepatan prosedur investasi dan prosedur berusaha, dengan biaya yang lebih efisien dan transparan;
2. Penyederhanaan aturan terkait implementasi proyek-proyek KPS;
3. Peningkatan efisiensi sistem logistik nasional, melalui perluasan pelaksanaan National Single Window (NSW) serta pengembangan jalur dan sarana distribusi;
4. Pengembangan kawasan ekonomi khusus di koridor-koridor ekonomi yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi sebagai penampung kegiatan industri, ekspor-impor, dan kegiatan ekonomi lainnya;
5. Peningkatan iklim ketenagaan dan hubungan industrial, melalui : harmonisasi peraturan ketenagakerjaan dengan sinergi kebijakan pusat dan daerah, meningkatkan kemampuan negosiasi bagi serikat pekerja dan pengusaha, memperkuat kerjasama tripartit di daerah, serta meningkatkan profesionalisme ahli-ahli hubungan industrial dan hakim pengadilan hubungan industrial.

Berdasarkan sasaran ekonomi makro, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 7,0 % sedangkan pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 7,0 %. Sementara laju inflasi pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 5,0 % dan pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 5,0 %. Pada tahun 2015 pertumbuhan Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) ditargetkan sebesar 11,1 % dan pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 11,1 %. Sehingga kebutuhan investasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.041 Trilyun dan pada tahun 2016 dibutuhkan investasi sebesar Rp. Trilyun.

Berdasarkan rincian proyeksi gambaran persebaran realisasi penanaman modal tahun 2014 – 2019 yang disusun BKPM Republik Indonesia, pada tahun 2015 Provinsi Jawa Barat realisasi investasinya ditargetkan sebesar Rp. 54 Trilyun dan pada tahun 2016 diproyeksikan

realisasi investasinya sebesar Rp. ... Trilyun. Melihat realisasi investasi di Jawa Barat pada tahun 2014 dan stabilitas ekonomi di Indonesia dan Provinsi Jawa Barat kiranya target realisasi ini akan dapat tercapai.

BKPM Republik Indonesia mempunyai visi ***“Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian nasional”***. Untuk mewujudkan visi tersebut, dilaksanakan melalui 3 (tiga) misi yaitu :

1. Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal;
2. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.

Untuk menunjang visi dan misi tersebut, BKPM mempunyai sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional yang berorientasi pada kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan penanaman modal;
2. Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektivitas kegiatan promosi yang tepat sasaran;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang penanaman modal;
4. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, pengembangan potensi daerah, dan pemberdayaan usaha nasional;
5. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang terintegrasi dan terkoordinasi baik lintas sektor maupun lintas daerah;
6. Meningkatnya kerjasama di bidang penanaman modal;
7. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPMPT

Visi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat merupakan komitmen yang diharapkan mampu memotivasi segenap anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan gambaran kedepan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2013-2018).

Adapun Visi BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2018 adalah : **“Menjadi Lembaga Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan yang**

Andal dan Profesional” Pengertian dalam Visi Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat adalah :

- **Andal** dalam visi tersebut menunjukkan bahwa BPMPT Jabar dalam menyelenggarakan pelayanan penanaman modal dan perizinan akan senantiasa mengedepankan asas-asas pelayanan publik yang mengutamakan ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, akuntabilitas, keterbukaan dan juga menghasilkan perizinan yang akurat dan mengandung kekuatan hukum.
- **Profesional** dalam visi tersebut menunjukkan bahwa BPMPT Jabar senantiasa menampilkan kinerja terbaik dengan mengutamakan kepuasan masyarakat dalam melayani pelayanan penanaman modal dan administrasi perizinan di Jawa Barat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Misi Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat ditetapkan untuk mendukung dan mewujudkan Misi Provinsi Jawa Barat, yaitu :

- Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Dalam Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan.
- Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Yang Cepat, Tepat, Akurat, Transparan, Normatif dan Akuntabel untuk Kepuasan Masyarakat.
- Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan untuk mendorong peningkatan Investasi di Jawa Barat.
- Sarana Pelayanan serta Kualitas Data Investasi dan Perizinan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai bahan Kebijakan.
- Sinergitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan dengan Pemangku Kepentingan untuk mendorong peningkatan berusaha di Jawa Barat.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas dilakukan melalui pengembangan industri input untuk memperkuat sisi hilir dan meningkatkan nilai tambah dan produktivitas baik di kegiatan agribisnis maupun industri pengolahan. Peningkatan kemitraan antar usaha kecil dan menengah dan jejaringnya merupakan kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Penguasaan teknologi informasi yang didukung pembangunan infrastruktur wilayah yang strategis merupakan upaya akselerasi perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Misi yang menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode tahun 2013 - 2018 berdasarkan urusan pemerintahan. Sejalan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan, kebijakan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT)

Provinsi Jawa Barat, fokus kepada Misi 2 dan Misi 3 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -2018.

Misi 1 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Penanaman Modal.

Kebijakan : memberikan fasilitas bagi upaya peningkatan promosi dan kerjasama penanaman modal

Misi 2 : Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Pelayanan.

Kebijakan : meningkatkan sumber daya aparatur, daya dukung, sarana prasarana, dan pendanaan dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dari faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi kemudian ditetapkan tujuan organisasi yang harus diraih sampai dengan tahun 2018. Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan ditetapkan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Berdasarkan misi yang telah dirumuskan, tujuan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan fasilitas penanaman modal agar timbul dan berkembang sesuai dengan kebutuhan perekonomian Jawa Barat;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur, daya dukung, sarana prasarana dan pendanaan dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat;

Dari tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat menjadi dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerjanya sehingga merupakan alat pemicu supaya semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai dan untuk itulah telah ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya volume dan nilai penanaman modal di Jawa Barat berdasarkan kebijakan yang efisien dan efektif serta berwawasan lingkungan;
2. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan disiplin SDM aparatur;
3. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2016 Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat melaksanakan 12 (sebelas) program yang diterjemahkan dalam 23 (dua puluh dua) kegiatan.

Program yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;
2. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
7. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur;
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
9. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur;
10. Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi;
11. Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan.

Dari program tersebut diurai melalui sejumlah kegiatan. Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang telah dibuat oleh organisasi, dengan kata lain program merupakan kumpulan dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan memiliki dimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan dari kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional instansi yang berdimensi 5 (lima) tahunan.

Kegiatan Pokok Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari program kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Pendataan Penanaman Modal di Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Pengelolaan dan Publikasi Data Base Perijinan;
3. Evaluasi dan Monitoring dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
4. Penyelenggaraan Administrasi Permohonan Perijinan pada Objek Perijinan di Lapangan;
5. Forum Sinergitas Tim Teknis Perijinan;
6. Updating Persyaratan Perijinan Fasilitasi Pelayanan Perijinan;
7. Fasilitasi Pelayanan Perijinan di 4 Gerai dan Layanan SMS;
8. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Perijinan Secara Online;
9. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
10. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPMPT;
11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor;
13. Peningkatan Kemampuan Aparatur pada BPMPT;
14. Peningkatan Kesejahteraan Aparatur pada BPMPT;
15. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran;
16. Peningkatan Kompetensi Aparatur;
17. Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi;
18. Sosialisasi Pelayanan Perijinan di Jawa Barat;
19. Penyusunan Profil Peluang Investasi di Jawa Barat
20. Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal;
21. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal PMA/PMDN;
22. Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Penanaman Modal dan Perijinan

Secara lebih lengkap program dan kegiatan BPMPT Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2016
Dan Prakiraan Maju Tahun 2017
BKPPMD Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.17.29	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi								
1.17.29.01	Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terlaksananya event promosi dan kerjasama investasi	Seluruh Jawa Barat, Luar Provinsi Jawa Barat dan Luar Negeri	14 kali	6.000.000.000	APBD		14 kali	6.500.000.000
1.17.29.02	Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perijinan di Jawa Barat	Terlaksananya sosialisasi pelayanan perijinan	Seluruh Jawa Barat	6 kali	450.000.000	APBD		6 kali	600.000.000
1.17.29.03	Kegiatan Penyusunan Profil Peluang Investasi di Jawa Barat	Tersusunnya dokumen profil peluang investasi Jawa Barat	Seluruh Jawa Barat	1 dokumen	750.000.000	APBD		1 dokumen	900.000.000
1.17.29.04	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	Tersusunnya dokumen kebijakan penanaman modal	Kota Bandung	1 dokumen	2.500.000.000	APBD		1 dokumen	2.750.000.000
1.17.29.05	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan	Jumlah kegiatan pembinaan	Seluruh Jawa Barat	6 kali	1.000.000.000			6 kali	1.200.000.000

	Penanaman Modal PMA/PMDN	terhadap perusahaan							
1.17.79	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
1.17.79.01	Kegiatan Pembinaan dan Pendataan Penanaman Modal di Daerah Provinsi Jawa Barat	Data minat dan realisasi investasi Kab/Kota Jawa Barat	Jawa Barat	27 Kab/Kota	750.000.000	APBD		27 Kab/Kota	900.000.000
1.17.79.02	Kegiatan Pengelolaan dan Publikasi Data Base Perijinan	Terpeliharanya data base perijinan	Kota Bandung	100 %	150.000.000	APBD		100 %	250.000.000
1.17.53	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi								
1.17.53.01	Kegiatan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Perijinan Secara Online	Terbangunnya sistem informasi	Kota Bandung	100 %	200.000.000	APBD		100 %	350.000.000
1.17.57	Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah								
1.17.57.01	Kegiatan Evaluasi dan Monitoring dan Pelayanan Perijinan Terpadu	Terlaksananya evaluasi dan monitoring	Jawa Barat	100 %	850.000.000	APBD		100 %	950.000.000
1.17.57.02	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Permohonan Perijinan pada Objek Perijinan di	Terlaksananya penyelenggaraan permohonan perijinan	Jawa Barat	100 %	1.600.000.000	APBD		100 %	1.750.000.000

	Lapangan								
1.17.57.03	Forum Sinergitas Tim Teknis Perijinan	Jumlah kegiatan forum	Jawa Barat	4 kali	100.000.000	APBD		4 kali	250.000.000
1.17.57.04	Updating Persyaratan Perijinan Fasilitasi Pelayanan Perijinan	Terlaksananya updating	Kota Bandung	100 %	200.000.000	APBD		100 %	350.000.000
1.17.57.05	Fasilitasi Pelayanan Perijinan di 4 Gerai dan Layanan SMS	Terlaksananya pelayanan di gerai dan SMS	Jawa Barat	100 %	950.000.000	APBD		100 %	1.100.000.000
1.17.59	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur								
1.17.59.01	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur pada BPMPT	Meningkatnya kemampuan aparatur BPMPT	Kota Bandung	75 %	500.000.000	APBD		80 %	650.000.000
1.17.59.02	Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur pada BPMPT	Meningkatnya kesejahteraan aparatur BPMPT	Kota Bandung	75 %	950.000.000	APBD		80 %	1.100.000.000
1.17.60	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1.17.60.01	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya administrasi perkantoran BPMPT	Kota Bandung	95 %	4.300.000.000	APBD		95 %	4.500.000.000
1.17.61	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1.17.61.01	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor BPMPT	Kota Bandung	75 %	1.750.000.000	APBD		80 %	1.900.000.000
1.17.61.02	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor BPMPT	Kota Bandung	75 %	1.500.000.000	APBD		80 %	1.650.000.000
1.17.62	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana								

	Aparatur								
1.17.62.01	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran BPMPT	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Kota Bandung	80 %	2.200.000.000	APBD		85 %	2.400.000.000
1.17.66	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
1.17.66.01	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	Kota Bandung	95 %	150.000.000	APBD		95 %	150.000.000
1.17.67	Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan								
1.17.67.01	Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Program/ Kegiatan Penanaman Modal dan Perijinan	Terwujudnya fasilitasi koordinasi perencanaan dan evaluasi program/ kegiatan	Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat	100 %	1.500.000.000	APBD		100 %	1.700.000.000